

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan desa merupakan proses terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan di tingkat lokal. Salah satu instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi mengelola aset, menyediakan layanan, serta mengembangkan kegiatan usaha berbasis potensi lokal. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi desa sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara berkelanjutan (Harun dkk., 2024). Seiring meningkatnya peran BUMDes dalam perekonomian desa, tuntutan terhadap tata kelola dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel juga semakin besar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan kekayaan desa yang dipisahkan. Selain berorientasi pada pencapaian keuntungan, BUMDes juga memiliki fungsi sosial dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal (Harun dkk., 2024). Prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan yang sehat dalam pengelolaan BUMDes diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021

tentang Badan Usaha Milik Desa dan Keputusan Menteri Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sebagai lembaga yang mengelola dana publik desa, BUMDes dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan (Lestari dkk., 2025). Keandalan tersebut sangat bergantung pada keberadaan pengendalian internal yang memadai, khususnya dalam pengelolaan kas. Kas merupakan aset yang paling likuid dan paling sering digunakan dalam kegiatan operasional, sehingga memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi terhadap kesalahan pencatatan maupun potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, pengendalian internal kas menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan aset, menjamin keandalan pencatatan transaksi, serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (Sumarna & Novitasari, 2022), sejalan dengan prinsip-prinsip pengendalian internal seperti yang diatur dalam kerangka COSO.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen serta seluruh personel organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kerangka COSO menekankan lima komponen pengendalian internal yang saling

berkaitan, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), serta pemantauan (*monitoring activities*). Dalam pengelolaan kas BUMDes, kerangka COSO dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis sejauh mana pengendalian internal yang ada telah memadai.

Dalam pengelolaan kas BUMDes, pengendalian internal yang kuat tidak hanya memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan risiko penyimpangan, kecurangan, serta kesalahan administrasi (A. M. Sari dkk., 2024). Pengendalian internal kas yang efektif turut berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap lembaga ekonomi desa tersebut. Dengan menggunakan kerangka COSO sebagai acuan, pengendalian internal kas dapat dianalisis secara lebih sistematis berdasarkan kelima komponennya.

Berbagai penelitian terdahulu yang menggunakan kerangka COSO sebagai acuan penilaian menunjukkan bahwa pengendalian internal pada BUMDes masih menghadapi berbagai kelemahan pada beberapa aspek pengendalian. Sukarmayasa dan Atmadja (2024) menemukan bahwa pengendalian internal pada BUMDes Giri Amertha Sadhu telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kelemahan pada komponen penilaian risiko serta informasi dan

komunikasi akibat belum tersusunnya SOP keuangan dan belum meratanya penerapan sistem pencatatan keuangan. Sejalan dengan temuan tersebut, Achmad dkk. (2022) menunjukkan bahwa pengendalian internal pada BUMDes Bantal Asembagus telah diterapkan dengan baik, tetapi masih terdapat kelemahan pada komponen informasi dan komunikasi karena belum didukung oleh SOP keuangan. Sementara itu, Prabowo dan Kurniawan (2023) menemukan bahwa pengendalian internal laporan keuangan pada BUMDes Mekar Sari telah diterapkan dengan baik dan didukung oleh SOP yang memadai, meskipun dinamika transaksi yang tidak terencana masih menimbulkan kendala dalam ketepatan pelaporan.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal kas pada beberapa BUMDes masih belum optimal. Yegi (2021) menemukan bahwa pengendalian internal pengeluaran kas pada BUMDes Matador belum berjalan secara efektif, terutama pada aspek dokumentasi transaksi dan pengelolaan karyawan. Ni Luh De Erik Trisnawati (2022) juga menemukan bahwa pengendalian internal pada BUMDesa Sidi Amertha belum diterapkan secara efektif, khususnya pada komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan aktivitas pengendalian. Selanjutnya, Yuda Ramadhan (2021) menunjukkan bahwa pengendalian internal pengeluaran kas pada BUMDes Jaya Karya sebagian besar telah sesuai dengan kerangka COSO, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada subkomponen lingkungan pengendalian dan pemantauan kinerja.

Selain itu, Dewy (2022) menemukan bahwa pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada BUMDes Bima Jaya secara umum telah sesuai dengan kerangka COSO, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek pemisahan fungsi yang berpotensi meningkatkan risiko kecurangan. A. M. Sari dkk. (2024) menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada BUMDes Sumber Sejahtera telah diterapkan secara sistematis dan transparan, namun pengendalian internal kas masih memerlukan perbaikan pada aspek pemisahan fungsi organisasi dan kesesuaian pencatatan kas dengan standar akuntansi. N. K. Sari dkk. (2025) juga menemukan bahwa efektivitas pengendalian internal berbeda pada setiap unit usaha BUMDes, sehingga diperlukan evaluasi untuk memastikan konsistensi penerapannya. Sementara itu, Alpriliana dkk. (2023) menunjukkan bahwa pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada BUMDes Café Sawah Pujon belum berjalan efektif karena masih terdapat kelemahan pada struktur organisasi, pemisahan tugas, prosedur pencatatan, dokumentasi transaksi, dan aktivitas pengawasan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pada BUMDes masih memiliki berbagai kelemahan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan kas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas dengan menggunakan kerangka COSO sebagai acuan penilaian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pengendalian internal kas yang ada.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal (2025), Kabupaten Tegal memiliki 281 desa. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2025 yang bersumber dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, terdapat 268 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di wilayah Kabupaten Tegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 BUMDes berstatus dasar, 57 BUMDes berstatus tumbuh, 87 BUMDes berstatus berkembang, dan 8 BUMDes berstatus maju, sedangkan 67 BUMDes lainnya masih dalam proses legalitas badan hukum.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap beberapa BUMDes di Kabupaten Tegal, ditemukan bahwa kondisi operasional dan pengelolaan BUMDes menunjukkan variasi yang berbeda-beda. Sebagian BUMDes belum beroperasi secara optimal, sementara sebagian lainnya telah menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi tersebut, penelitian ini menetapkan BUMDes Kalimas sebagai objek penelitian. BUMDes Kalimas mulai beroperasi pada tahun 2019 dan menyediakan berbagai layanan pembayaran, antara lain pembayaran BPJS Kesehatan, listrik bulanan, pulsa listrik, listrik non-tagihan, PDAM, *multifinance* atau setoran kredit kendaraan bermotor, serta layanan transfer ke rekening Bank BRI maupun transfer antarbank.

BUMDes Kalimas memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang proporsional serta tanpa rangkap jabatan dengan perangkat desa. Dalam aspek pengelolaan kas, kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan berdasarkan standar operasional

prosedur (SOP) yang telah ditetapkan serta didukung oleh mekanisme otorisasi berjenjang sebagai instrumen pengendalian untuk meminimalkan risiko kesalahan maupun penyalahgunaan dana.

Secara konseptual, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah dirancang dan diimplementasikan dalam kerangka tata kelola organisasi. Namun, keberadaan struktur dan prosedur formal tersebut perlu dianalisis secara komprehensif untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Efektivitas pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulatif, tetapi juga oleh konsistensi penerapan, keandalan informasi yang dihasilkan, serta efektivitas mekanisme pemantauan dalam memastikan keberlangsungan dan perbaikan sistem pengendalian.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas dengan menggunakan kerangka COSO sebagai acuan untuk menilai sejauh mana pengendalian internal yang ada telah memadai. Analisis difokuskan pada lima komponen pengendalian internal, yaitu *control environment*, *risk assessment*, *control activities*, *information and communication*, serta *monitoring activities*. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “**Analisis Pengendalian Internal Kas Berbasis Kerangka COSO pada BUMDes Kalimas.**”

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen lingkungan pengendalian?

2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen penilaian risiko?
3. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen aktivitas pengendalian?
4. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen informasi dan komunikasi?
5. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen pemantauan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen lingkungan pengendalian.
2. Menganalisis pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen penilaian risiko.
3. Menganalisis pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen aktivitas pengendalian.
4. Menganalisis pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen informasi dan komunikasi.
5. Menganalisis pelaksanaan pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas jika ditinjau dari komponen pemantauan.

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoretis

1. Bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan desa, penelitian ini memberi tambahan bukti empiris

mengenai pengendalian internal kas pada BUMDes dengan menggunakan kerangka COSO sebagai acuan analisis.

2. Bagi mahasiswa dan peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyusun penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengendalian internal dan pengelolaan kas pada lembaga ekonomi desa.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi pengelola BUMDes Kalimas, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pengendalian internal kas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menganalisis dan meningkatkan kualitas pengendalian internal kas pada BUMDes Kalimas.
2. Bagi pembaca dan pihak berkepentingan lainnya, penelitian ini menambah pemahaman tentang pentingnya pengendalian internal kas dan pemanfaatan kerangka COSO dalam meningkatkan keandalan pengelolaan keuangan BUMDes.